

(21)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI **JUN** JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 17

TAHUN 2008

Mengikat Dolar dari Genangan Minyak



Disarikan dari hasil wawancara
dengan Utusan Khusus
Presiden untuk Timur Tengah
Dr Alwi Shihab

Tingginya harga minyak mentah dunia membuat ekonomi sebagian besar negara produsen minyak di kawasan Timur Tengah terlimpah rezeki. Terlebih bagi negara-negara Arab yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC), yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) GCC di atas rata-rata pertumbuhan global. Analisis strategi pasar Barclays Capital, London, Inggris, Koon Chow mengatakan, dalam lima tahun terakhir, PDB GCC rata-rata di atas 7%. Pada 2008, pertumbuhan PDB GCC bisa mencapai angka di atas 6%—di tengah melemahnya pertumbuhan global yang diestimasi rata-rata berkisar 3,7%.

Saat ini, negara-negara Arab masih menikmati lonjakan harga minyak bumi. Namun, pasar investasi finansial dari Arab ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa masih sulit dikembangkan. Terlebih, pasca-

tragedi 11 September 2001 yang menghantam World Trade Center (WTC), AS, hal tersebut membuat penumpukan modal di Timur Tengah. Tragedi WTC membuat pasar keuangan di AS dan Eropa lebih selektif menerima aliran modal investor dari Arab karena muncul kekhawatiran modal tersebut terkait dengan aksi terorisme.

Kondisi ini membuat pasar keuangan Asia menjadi alternatif utama yang dilirik pemilik modal Arab. Bahkan, ada kecenderungan pemodal negara-negara Arab tertarik mengembangkan investasi mereka di Asia dalam bentuk portofolio. Hal ini disebabkan pasar Asia dianggap menjanjikan karena pertumbuhan ekonominya yang berkesinambungan dan seurentak di sejumlah kawasan. Selain itu, kondisi sosial politik Asia dinilai cukup stabil.

76

Dalam hitungan bisnis, penumpukan kapital yang tersedia di kawasan Timur Tengah tidak mungkin hanya mengendap di lembaga keuangan. Investasi menjadi salah satu pertimbangan utama bagi negara-negara kaya minyak itu. Wajar jika sebagian besar negara di dunia tengah berharap mendapat limpahan rezeki dari Timur Tengah dalam bentuk investasi.

Para investor negara-negara Arab dikabarkan ingin meningkatkan alokasi portofolio mereka untuk Asia mencapai USD250 miliar (30% dari total investasi mereka dalam kurun waktu lima tahun ke depan). Investasi portofolionegara-negaraArabkeAsiaselama ini hanya mencapai 10%. Sektor-sektor perbankan, pangan, dan telekomunikasi menjadi sektor yang kini tengah diincar investor negara-negara Arab.

Tentu saja, peluang tersebut harus direbut Indonesia. Sebab, sejumlah investor negara-negara Arab mulai melirik negara Asia seperti China, India, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Negara-negara tetangga telah melihat potensi yang besar itu dan mereka berupaya secara progresif merengkuhnya.

Stabilitas politik menjadi pertimbangan utama sejumlah investor negara Arab untuk menanamkan investasinya di sebuah negara. Indonesia mempunyai peluang besar untuk menarik investasi dari negara-negara kaya minyak itu. Menurut pendapat penulis, pemerintahan sekarang merupakan yang terkuat sejak rezim Orde Baru berakhir. Maraknya demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia bukanlah ukuran akan stabilitas politik mengingat demonstrasi merupakan salah satu indikator demokrasi.

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak awal memimpin membuktikan kesungguhan pemerintah untuk memberikan jaminan kepada para investor. Sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi

menjadi salah satu faktor penghambat mengalirnya investasi.

Untuk mendukung masuknya investasi dari Timur Tengah, pemerintah aktif melakukan upaya agar aliran dana bisa sampai ke Indonesia. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada beberapa kesempatan ke luar negeri, termasuk ke Timur Tengah, berperan sebagai "sales person". Di setiap kesempatan Presiden menjelaskan kepada masyarakat internasional bahwa pemerintah menjamin kebijakan yang memudahkan investor dalam berinvestasi. Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) juga menerima masukan dari para investor untuk memperbaiki iklim investasi. Usaha Presiden dan Wapres juga didukung menteri-menteri terkait, termasuk Kepala Badan Koordinasi Penediaan Modal (BKPM) yang agresif mengundang investasi.

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah mendatangkan investasi dari Timur Tengah adalah penunjukan utusan khusus presiden (*president's envoy*) untuk Timur Tengah. Kebetulan, posisi tersebut dijabat penulis. Dengan keberadaan *president's envoy*, para investor bisa berkomunikasi langsung dengan Presiden karena *president's envoy* mempunyai akses langsung ke pucuk pemerintahan.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan hasil positif. Hal ini dibuktikan dengan dua bank asal Timur Tengah, Al Barakah Bank Bahrain dan Qatar Islamic Bank. Bahkan, dalam waktu dekat juga akan masuk Qatar National Bank, Al Rajhi dari Arab Saudi, Kuwait Financial House dari Kuwait. Padahal, selama ini tidak pernah ada sejarah bank Timur Tengah berinvestasi di Indonesia. Masuknya bank-bank tersebut merupakan pertanda baik.

Selain itu, investasi di sektor lain pun mulai tampak. Di bidang real estat, misalnya, perusahaan properti Uni Emirat Arab, Emaar, akan menginvestasikan dana sekitar USD600 juta untuk membangun kawasan wisata di Lombok

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Opsi Pengembangan Bukit Asam



**CYRILLUS
HARINOWO***

BELAKANGAN ini kalangan pasar modal Indonesia mengalami demam penawaran saham perdana (IPO) perusahaan batu bara terbesar kedua di Indonesia, yaitu PT Adaro. Dengan melepas sepertiga sahamnya, pemilik perusahaan tersebut diperkirakan meraup dana sekitar Rp12 triliun. Nilai IPO paling besar, dalam sejarah pasar modal Indonesia.

Dengan IPO sebesar itu, dan diharapkan naik lagi harganya setelah pencatatan saham perdana, Adaro jelas akan menjadi saham unggulan (*bluechip*) baru pasar modal Indonesia, menyusul raksasa batu bara sebelumnya, yaitu PT Bumi Resources, yang belakangan ini kapitalisasi pasarnya bersaing ketat dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom).

Melihat debut Adaro, kita teringat perusahaan batu bara yang jauh lebih tua, tetapi perkembangannya terkendala, yaitu PT Bukit Asam Tbk.

Perusahaan tersebut memiliki sejarah sangat panjang, karena sudah berdiri pada 1911 dan dikembangkan di zaman kolonial Belanda. Satu-satunya BUMN di bidang batu bara tersebut saat ini berdiri di atas deposit batu bara terbesar di Indonesia, yaitu lebih dari enam miliar ton. Jika harga batu baranya dinilai sama dengan harga *spot* di New Castle, yaitu sekitar USD130 per ton, nilai deposit tambang itu hampir mencapai USD800 miliar. Nilai yang sungguh fenomenal.

Lalu, apa yang membebani perusahaan tersebut sehingga sulit berkembang? Melihat laporan keuangan perusahaan, kita melihat Bukit Asam sama sekali tidak memiliki pinjaman bank. Di sisi lain, perusahaan tersebut pada 2007 juga memperoleh laba yang lumayan besar dari penjualan sekitar Rp4 triliun.

Jumlah ini berada jauh di bawah Bumi Resources yang penjualannya mencapai sekitar USD2,2 miliar (sekitar Rp20 triliun), sedangkan penjualan Adaro mencapai Rp16 triliun. Perbedaan ini disebabkan volume penjualan yang juga jauh berbeda,

77

yaitu sekitar 50 juta ton untuk Bumi Resources (dari tambang KPC dan Arutmin), sedangkan Adaro menjual sekitar 38 juta ton. Bukit Asam hanya mampu menjual sekitar 10 juta ton, jumlah yang tidak banyak berubah lebih dari lima tahun terakhir.

Dari sisi produksi dan penjualan, sebetulnya perusahaan tersebut tidak mengalami kendala.

Tambang terbuka yang demikian besar di Tanjung Enim mampu memproduksi batubara dalam jumlah sangat besar. Melihat ketinggian tebing, tampak jelas sarana produksi yang mengeduk kekayaan bumi Indonesia tersebut dan menyalurkannya melalui ban berjalan sampai titik pengangkutan dengan kereta api. Yang menjadi kendala terbesar, adalah transportasi.

Bumi Resources merupakan perusahaan yang menguntungkan. Tambangnya di Kalimantan Timur terletak tidak jauh dari laut. Karena itu, produksinya langsung bisa diangkut dengan "belt conveyor" yang menjorok ke laut sepanjang 14 kilometer, sehingga langsung bisa masuk ke kapal besar. Demikian juga Arutmin yang relatif

dekat dengan Batu Licin, sehingga pengangkutan pun tidak terlalu sulit.

Lain halnya dengan Adaro, Produksi batu baranya selama ini diangkut truk sehingga melewati jalan yang dibangun perusahaan maupun jalan umum. Adaro berencana membangun "belt conveyor" sejauh 67 kilometer. Rencana ini pasti dapat memperbesar kapasitas transportasi batu bara tanpa harus banyak mengganggu infrastruktur publik yang ada.

Lalu, bagaimana dengan Bukit Asam? Tambang utama Bukit Asam terletak di Tanjung Enim, tidak jauh dari ibu kota Kabupaten Muara Enim. Lokasi tambang itu lumayan jauh dari laut. Itulah sebabnya untuk pengangkutan batu bara, Bukit Asam menggunakan jasa PT Kereta Api, yaitu melalui jalur Tanjung Enim ke Tarahan, di Lampung, dan juga Tanjung Enim-Kertapati di dekat Palembang. Sayangnya, pengangkutan melalui kereta api tersebut, yang dikenal dengan babaranjang (batu bara rangkaian panjang), sering tidak *reliable*. Lantaran jalur kereta apinya hanya tunggal, pengangkutan menjadi lam-

bat karena setiap kali harus ada pertemuan kereta api di tengah jalan.

Itulah sebabnya, pengangkutan batu bara melalui kereta api tersebut hanya berkisar delapan juta ton. Inilah yang akhirnya menjadi kendala bagi Bukit Asam untuk memperbesar produksi. Dengan jumlah tersebut, setiap tahun Bukit Asam harus mengeluarkan hampir Rp1 triliun kepada PT Kereta Api. Jumlah itu jauh lebih tinggi daripada biaya penambangannya. Ini berarti biaya transportasinya mencapai sekitar USD10 setiap ton.

Dengan sudah teridentifikasinya permasalahan, sebetulnya relatif mudah untuk memecahkan masalah tersebut. Yang diperlukan adalah pengembangan sarana transportasi sehingga mampu mengangkut jumlah batu bara lebih banyak.

Rencana pengembangan "belt conveyor" oleh Adaro sepanjang 67 kilometer semestinya membuka mata manajemen Bukit Asam bahwa opsi tersebut sangat terbuka, dan mungkin sangat menguntungkan untuk dikembangkan. Bahkan, mungkin manajemen perlu berpikir

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 SUMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

Bapepam: IPO Adaro tidak Bisa Dibatalkan

JAKARTA — Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), Fuad Rahmany, menyatakan, pihaknya tidak dapat membatalkan rencana penawaran umum saham perdana (*initial public offering/ IPO*) PT Adaro Energy Tbk. Sengketa hukum atau pun hak angket yang akan diajukan Badan Musyawarah (Bamus) DPR tidak bisa menghalangi rencana IPO.

"Untuk kepentingan pasar modal, saya hati-hati sekali soal Adaro karena banyak yang memberitahukan soal sengketa hukum. Namun, jika sengketa hukum bisa membatalkan IPO, ya tidak ada yang akan IPO," ujar Ketua Bapepam LK, Fuad Rahmany, di Jakarta, akhir pekan lalu. Semua perusahaan yang akan masuk bursa, menurut Fuad, memang harus memberikan keterangan secara transparan.

Pihak Bapepam menegaskan, pihaknya akan melindungi pemegang saham publik jika terjadi masalah di kemudian hari akibat sengketa hukum. Dalam hal itu, jika Adaro menghadapi sengketa hukum dari pihak lain, itu merupakan urusan perusahaan. Tugas Bapepam adalah memastikan bahwa publik mengetahui masalah tersebut, dan Bapepam yang mengamankan pasar.

"Skenario terburuk, jika ada masalah hukum, pemegang saham publik harus dilindungi. Itu yang saya jaga," kata Fuad, tegas. Bapepam, menurut dia, tidak berurusan dengan sengketa hukum Adaro oleh MA atau pengacara pihak tertentu (Beckett). Ia juga menyatakan, Bapepam tidak mengambil posisi untuk memihak siapapun.

Bapepam juga menyatakan, pihaknya sama sekali tidak bisa membatalkan IPO Adaro, walaupun DPR menyetujui digelarnya hak angket untuk menyelidiki kasus pajak *transfer pricing* yang disebut-sebut dilakukan Adaro.

Sebelumnya, dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR Kamis (12/6) lalu, para pimpinan fraksi, kecuali Fraksi Demokrat, sepakat mengusulkan hak angket untuk menyelidiki ada tidaknya kerugian negara dalam masalah Adaro. Hak angket itu akan diajukan ke Rapat Paripurna, Selasa (17/6) besok. Bila rapat setuju, DPR akan meminta Bapepam LK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) membatalkan IPO Adaro.

Karena itu, Fuad sekali lagi menegaskan, Bapepam LK tidak bisa membatalkan IPO karena dorongan DPR. "Bapepam adalah independen, netral, dan tidak pernah curiga," ujar Fuad.

Pendapat Fuad tersebut di-

78

sokong mantan Ketua Bapepam, Marzuki Usman. Marzuki mengatakan, perusahaan yang sedang dalam proses hukum tidak terhalangi untuk melakukan IPO. "Asal masalah hukum yang dihadapi itu masalah perdata. Kalau kasusnya pidana atau kriminal, jelas tidak bisa masuk bursa," kata Marzuki.

Marzuki menambahkan, yang paling penting dari perusahaan yang akan menggelar IPO tersebut adalah memberikan keterbukaan sehingga investor mengetahui risiko sepenuhnya. "Transparansi itu akan berguna dan membuat investor dapat menilai, mau beli atau tidak," ujar dia.

Adaro Energy sendiri sebenarnya tidak alpa melakukan transparansi tersebut melalui prospektus awal penawaran saham yang dirilis 13 Mei lalu. "Semua risiko usaha perseroan sudah kami jelaskan pada prospektus. Tidak ada yang ditutup-tutupi," kata Sekretaris Perusahaan Adaro Energy, Andre J Mamuaya.

Di sisi lain, sambutan ter-

hadap rencana IPO Adaro begitu besar. Direktur PT Asia Kapitalindo Sekuritas, Harry Kurniawan, menyatakan, masuknya saham Adaro ke lantai bursa akan menambah nilai kapitalisasi pasar BEI hingga Rp 2.000 triliun. "Jika Adaro sudah berhasil masuk, diharapkan akan diikuti perusahaan batu bara lainnya, seperti Kodeco dan Berau Cool," kata Harry.

Harry sendiri yakin, Adaro akan lolos memenuhi ketentuan hukum pasar modal. "Saya yakin Bapepam-LK akan memberikan persetujuan efektif atas rencana IPO itu," kata Harry.

Antusiasnya pasar dapat dibuktikan dari kondisi pasar. Meski mengalami tekanan dan bergerak fluktuatif karena kondisi perekonomian global dan inflasi tinggi, namun hasil yang dicapai dalam *book building* Adaro cukup menggembirakan. Tak tampak adanya pengaruh kelesuan akibat kondisi perekonomian dan tingginya inflasi tersebut. ■ una

IPO yang Dinanti Pasar

Pelaku pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tampaknya tak sabar menunggu realisasi penawaran umum perdana (IPO) PT Adaro Energy Tbk. Dengan target perolehan dana segar Rp 12,3 triliun, IPO Adaro akan membuat pasar saham di BEI lebih likuid.

"Masuknya saham Adaro diharapkan akan menambah likuid perdagangan saham di bursa," kata Direktur Utama BEI, Erry Firmansyah, akhir pekan lalu.

Pendapat senada disampaikan beberapa pelaku pasar saham, yakni Direktur PT Asia Kapitalindo Sekuritas, Harry Kurniawan, dan Analis Riset PT Paramitra Alfa Sekuritas, Pardomuan Sihombing.

Adaro Energy Tbk akan melepas 34,83 persen atau 11,14 miliar lembar sahamnya ke bursa dengan harga perdana Rp 1.100 per lembar saham. Dengan harga sebesar itu, nilai kapitalisasi saham Adaro Energy seluruhnya mencapai sekitar Rp 35,2 triliun. Saat ini proses IPO Adaro sedang menunggu pernyataan efektif dari Bapepam.

Saham Adaro, menurut Pardomuan Sihombing, memiliki prospek sangat

bagus karena industri tambang batu bara sedang *booming* di pasar komoditas. Perusahaan itu mengoperasikan usaha tambang terintegrasi di Kalimantan Selatan dengan produksi 36 juta ton (2007) dan jumlah cadangan 928 juta ton batu bara.

"Masuknya Adaro ke bursa akan menjadikan saham ini masuk dalam jajaran 10 terbesar nilai kapitalisasinya, di bawah Bumi Resources Rp 160 triliun dan Telkom Rp 150 triliun. Pelaku pasar jadi lebih banyak pilihan," kata Pardomuan.

Antusiasme pasar terhadap saham Adaro dapat terlihat dari hasil *book building* yang dilakukan 26 Mei-5 Juni lalu. Pada proses tersebut terjadi kelebihan permintaan sebanyak 6,57 kali, dengan jumlah total Rp 76,8 triliun. Tercatat, sebanyak 81,3 persen permintaan tersebut berasal dari investor asing dan 18,7 persen lainnya dari investor lokal. Para investor lokal itu didominasi investor institusi.

"Saham ini sangat menarik. Dilihat dari valuasinya, *price earning* (PE) Adaro adalah 16 kali, sedangkan industri sebesar 25 kali," kata Pardomuan.

■ ant

78

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 16

Joran Listrik

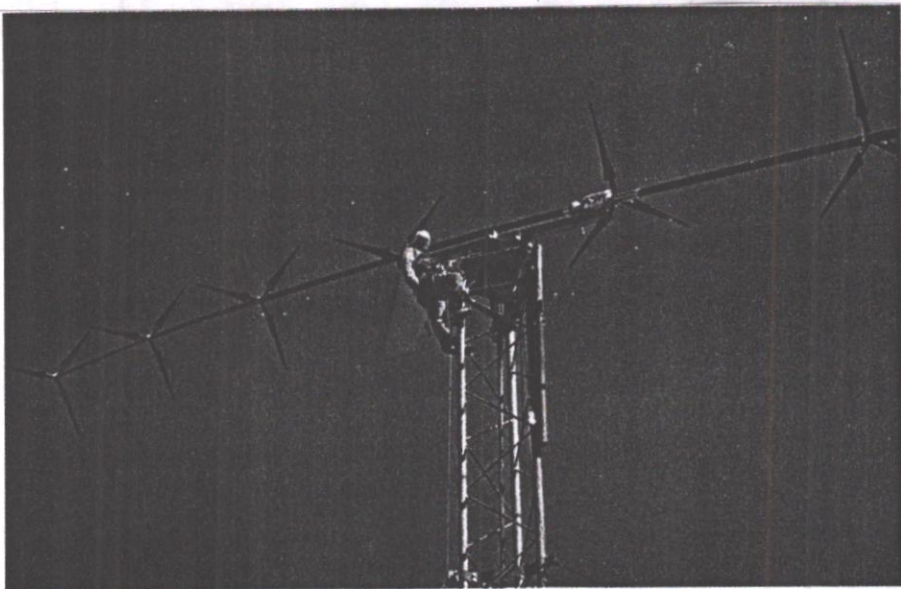
TAHUN 2008

DOUG Selsam ingin membuat turbin angin yang murah meriah: tak perlu lahan luas dan penyangga setinggi gedung 30 tingkat untuk menopang baling-baling sebesar sayap Boeing 747. Itu cita-citanya sejak dia di sekolah menengah. Maka, ketika kuliah di University of California, Irvine, ia menjadi "kutu laboratorium" dinamika fluida, tempatnya mengulik turbin ini. Kala itu awal 1980-an.

Ia drop out dari Irvine. Keinginannya membuat turbin angin terbengkalai akibat kesibukan sebagai gitaris *heavy metal* Metallix. Tapi, pada 1999, ia kembali menghabiskan seluruh waktunya untuk mengembangkan turbin ini di garasinya.

Kini Selsam sudah membikin turbin anginnya: berukuran sepersepuluh turbin biasa, tapi menghasilkan setrum dalam jumlah yang sama. Ia juga merevisi buku teks yang menyatakan setiap turbin hanya bisa memiliki sebuah kitiran demi mendapatkan embusan angin maksimal. "Saya buktikan bahwa itu tidak benar. Lebih banyak rotor sama dengan lebih banyak tenaga," ujarnya.

Turbin multiroturnya bakal menyemangati konferensi tahunan World Wind Energy ke-7 di Ontario, Kanada, yang berlangsung 24-26 Juni. Salah satu rancangan teruniknya adalah Superturbin Lepas Pantai alias joran listrik.

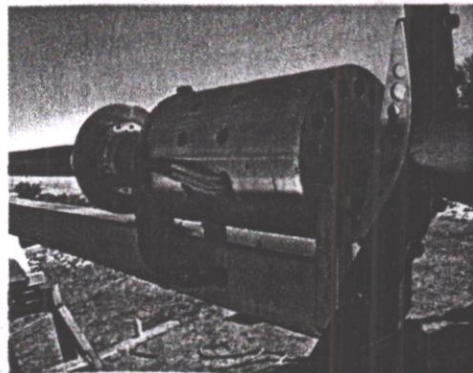


Membaca Angin

KUNCI Superturbin Lepas Pantai dalam memanen setrum adalah sudut kitiran yang optimal menangkap angin dan jarak masing-masing kitiran yang ideal.

Multirotor

LEBIH banyak rotor berarti fisika yang lebih kompleks. Tapi panen setrumnya berlimpah. Turbin rotor gandanya yang diberi nama Naga Langit bisa menghasilkan listrik 2.000 watt, cukup untuk memenuhi kebutuhan setrum dua rumah.



**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 18

TAHUN 2008

2 TAHUN LALU



27 Maret-2 April 2006

GELOMBANG demonstrasi membuat kasus Exxon menga-pung lagi. Senin pekan lalu, 62 anggota parlemen mengajukan hak angket atas penunjukan Exxon sebagai pengelola Cepu. Mereka berasal dari Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sosial.

Kasus ini mendidih lagi setelah Maret lalu pemerintah menekan kontrak baru dengan Exxon soal pengelolaan minyak

di Cepu. Ribuan warga berpawai menuju lokasi sumur minyak di Cepu. Mereka mengusung aneka spanduk, seperti "Mari Bung Rebut Kembali Cepu". Mereka menuding Exxon sebagai reinkarnasi kaum penjajah.

Kecaman itu muncul bersama dengan protes atas Freeport, tambang emas di Papua. Selain kepada PT ExxonMobil Indonesia dan PT Freeport Indonesia, protes ditujukan kepada PT Newmont, yang juga berasal dari Amerika Serikat.

Inilah antara lain buah kekecewaan panjang atas praktek penambangan perusahaan-perusahaan raksasa asing itu di Nusantara. Gelombang protes itu bagai membangunkan kembali sentimen nasionalisme di banyak lini. Sentimen nasionalisme ini pula yang muncul ketika sejumlah perusahaan negara dikuasai asing, seperti yang sedang terjadi pada Indosat.

79

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

Semua Proyek Tahun Ini Tuntas Laba PGN Tergerus Gejolak Kurs

Jakarta, Probisnis RM.

Menyusul gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar, laba bersih Perusahaan Gas Negara (PGN) mengalami penurunan 16,9 persen. Sekretaris Perusahaan PGN, Heri Yusup, usai rapat umum pemegang saham (RUPS) di Jakarta, mengatakan pada 2007, laba bersih yang telah diaudit mencapai Rp1,6 triliun atau turun 16,9 persen dibandingkan 2006.

"Penurunan laba bersih 2007 itu dikarenakan kenaikan rugi kurs menjadi Rp 504,2 miliar dari sebelumnya Rp 318,8 miliar yang merupakan keuntungan kurs pada 2006," ujarnya. Laba bersih me-

nurun, lanjutnya, juga akibat peningkatan beban bunga dari Rp 248,4 miliar di 2006 menjadi Rp 410,1 miliar di 2007.

Heri menambahkan, seluruh proyek pembangunan transmisi gas jalur Sumatera Selatan ke Jawa Barat (South Sumatera West Java/SSWJ) tahun ini. Diharapkan, penyelesaian proyek SSWJ tersebut akan meningkatkan penjualan gas dari sebelumnya 442 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) menjadi 716 MMSCFD.

Menurut dia, pada Maret 2009, pembangunan kompresor di Pagardewa, Sumsel diselesaikan dan jalur paralel Pagardewa-La-

buan Maringgai, Lampung rampung pada Oktober. Dalam RUPSLB yang digelar usai RUPS, disepakati, perubahan susunan dewan direksi dan komisaris PGN yang baru.

Sutikno yang sebelumnya Dirut PGN turun menjadi direktur, sedangkan Hendi Prio Santoso yang sebelumnya direktur keuangan naik menjadi dirut. RUPS juga menyetujui penambahan satu direktur yakni M Riza Pahlevi Tabrani.

Susunan dewan direksi PGN selengkapny adalah Dirut, Hendi Prio Santoso, yang didampingi lima direktur lainnya yakni Sutikno, Michael Baskoro PN, Bambang Banyudoyo, M Riza Pahlevi Tabrani, dan Djoko Pramono.

Sedang, perubahan dewan komisaris adalah masuknya mantan Kepala Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Kardaya Warnika, menggantikan Pudja Sunasa yang mengundurkan diri karena telah menjabat Irjen Departemen ESDM.

Susunan dewan komisaris PGN selengkapny adalah Komisaris Utama, TN Mahmud, yang didampingi empat komisaris yakni Kardaya Warnika, Ilyas Saad, Ki Agus Ahmad Badarudin, dan Nenny Miryani Saptadji. Hendi dan jajaran direksi baru lainnya yang sedianya menggelar jumpa pers usai RUPS mendadak dibatalkan dengan alasan tengah melakukan rapat. ■ MAF

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : II

TAHUN 2008

Sofyan Tak Jelaskan Perombakan Direksi PGN

JAKARTA –Meneg BUMN Sofyan Djalil merombak manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Namun, dia tidak menjelaskan alasan perombakan direksi dan komisaris emiten berkode saham PGAS itu.

Sekretaris perusahaan PGN Heri Yusup mengungkapkan, Meneg BUMN telah mengirimkan tiga surat kepada manajemen PGN yang berisi pergantian manajemen perseroan.

Dalam surat tersebut, Sofyan Djalil mengusulkan perpanjangan jabatan Nenny Miryani Saptadji dan Kardaya Warnika sebagai komisaris perseroan serta memberhentikan Pudja Sunasa selaku komisaris.

Meneg BUMN juga mengusulkan perombakan direksi perseroan. Jabatan dirut dipegang Hendi Prio Santoso yang semula menjabat sebagai direktur keuangan. Sedangkan mantan Dirut Sutikno kini menjadi direktur. "Surat dari Meneg BUMN te-

lah kami bacakan dan dalam surat tersebut tidak disebutkan alasan penggantian," ujar Heri usai rapat umum pemegang saham tahunan luar biasa (RUPST-LB) di Jakarta, akhir pekan lalu.

Meneg BUMN Sofyan Djalil yang ditanya secara terpisah mengenai hal itu menegaskan, pergantian direksi PGN merupakan rotasi guna meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. "Jadi, bukan karena ada masalah di PGN," tandasnya.

Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menambahkan, pergantian direksi PGN dilakukan berdasarkan penilaian hasil prestasi. "Pihak komisaris yang melakukan penilaian," tuturnya.

Pemecahan Saham

Menurut Heri Yusup, usulan pergantian direksi dan komisaris PGN telah disetujui dalam rapat yang dihadiri 75,1% pemegang saham perseroan. PGN juga telah mendapat persetujuan untuk me-

lakukan pemecahan nilai (*stock split*) saham Seri A dan Seri B dari Rp 500 menjadi Rp 100 per saham.

Hasil pemecahan nilai nominal saham Seri A lama menjadi lima saham nominal baru. Satu saham Seri A tetap dipertahankan sebagai Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp 100 per saham. Sedangkan empat saham lainnya akan dikeluarkan sebagai saham Seri B milik Negara Republik Indonesia.

Stock split tersebut rencananya dilakukan bulan depan. Pada penutupan akhir pekan lalu, PGAS menguat Rp 50 ke posisi Rp 14.300. "Tetapi kami akan lakukan pembagian dividen lebih dulu, baru setelah itu *stock split*," ujar Heri.

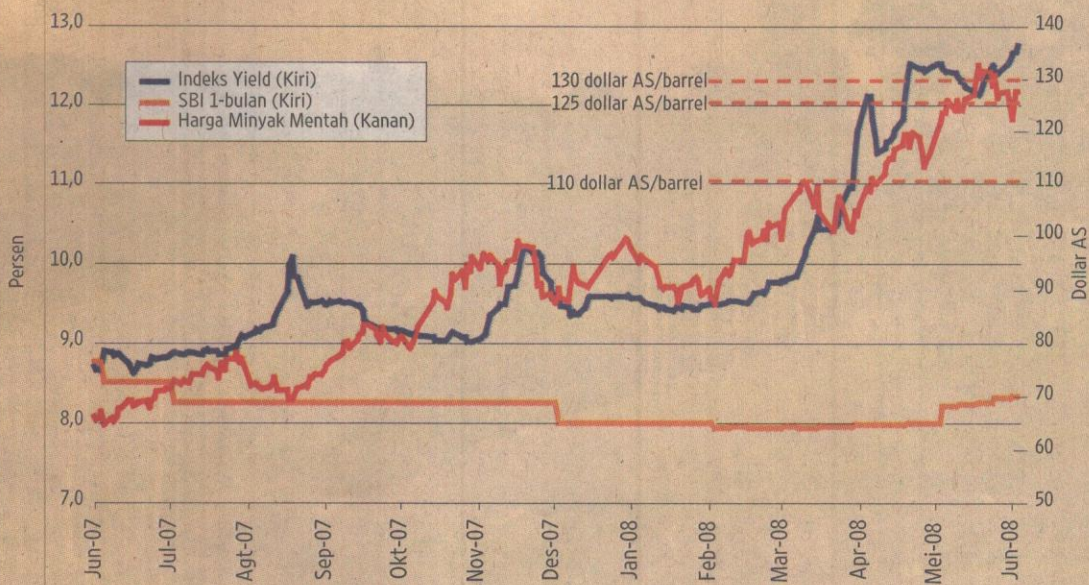
Menurut dia, RUPST akhir pekan lalu juga menyetujui pembagian dividen senilai Rp 786,2 miliar atau 50% dari total laba bersih 2007. Dividen sebesar Rp 170 per saham tersebut akan dibagikan pada Juli 2008.

Sisa laba bersih sebesar Rp 771,4 miliar digunakan sebagai dana cadangan lain untuk pengembangan usaha, tantiem direksi dan dewan komisaris. Sedangkan sisanya Rp 14,7 miliar digunakan sebagai dana cadangan wajib.

PGAS menargetkan mampu membukukan pertumbuhan pendapatan minimal hingga 15% tahun ini atau menjadi Rp 10,12 triliun dari tahun lalu Rp 8,80 triliun. Adapun laba bersih diharapkan menjadi Rp 1,84 triliun dari tahun lalu Rp 1,6 triliun. Target itu akan dicapai melalui peningkatan volume penjualan gas menjadi 716 *million cubic feet per day* (MMCFD). Volume penjualan gas tahun lalu hanya sekitar 442 MMCFD.

Heri mengungkapkan, pihaknya akan fokus mengerjakan proyek pipa transmisi Sumatera Selatan-Jawa Barat (SSWJ) yang diharapkan rampung pada Oktober 2008. (epa/shd/c117)

Indeks Yield, SBI, dan Harga Minyak Mentah



Sumber: Danareksa/Bloomberg/BEI

BESTARI

obligasi hingga mengecoh sampai tiga kali adalah kenaikan harga minyak yang menembus level psikologis tertentu.

Pemulihan harga obligasi pada awal April 2008 dibalikkan oleh kenaikan harga minyak yang menembus 110 dollar AS per barrel untuk pertama kalinya. Sementara itu, pemulihan harga pada akhir April dan Mei 2008 dibatalkan oleh kenaikan harga minyak, menembus 125 dollar AS per barrel dan 130 dollar AS per barrel.

Kelihatannya kenaikan harga minyak dunia menjadi momok yang menakutkan bagi pasar obligasi Indonesia. Para pelaku pasar melihat ada dua risiko utama yang dibawa oleh kenaikan harga minyak. Pertama, risiko kenaikan inflasi dari meningkatnya ongkos produksi barang dan jasa akibat kenaikan biaya energi. Naiknya inflasi akan menggerus nilai fundamental aset keuangan, termasuk obligasi.

Kedua, risiko anggaran pemerintah (*budget risk*). Kenaikan harga minyak akan menaikkan subsidi yang dilihat oleh investor akan menurunkan *cash flow protection* atas pembayaran ke-

wajiban keuangan pemerintah.

Investor melihat kenaikan subsidi menyebabkan misalokasi anggaran belanja sehingga dana pembangunan kepada sektor yang lebih produktif akan berkurang. Padahal, pembangunan sektor yang lebih produktif ini, seperti sektor infrastruktur, akan menentukan prospek dan profil risiko Indonesia dalam jangka panjang.

Inflasi adalah fenomena global yang menghantui banyak negara di dunia. Tekanan inflasi, yang salah satunya dari kenaikan harga minyak dunia, tidak hanya dialami Indonesia. Namun, dampaknya terhadap pasar modal, khususnya pasar obligasi, kelihatannya berbeda-beda.

Dibandingkan dengan level awal tahun 2008, *yield* obligasi domestik Malaysia saat ini hanya tumbuh 4 persen. Thailand, *yield* obligasi domestiknya tumbuh negatif 1,9 persen dibandingkan dengan pada awal tahun 2008.

Adapun *yield* obligasi rupiah, menggunakan contoh obligasi berjangka waktu 5 tahun, pertumbuhan *yield*-nya sebesar 35 persen, dari 9,43 persen pada

awal tahun menjadi 12,77 persen saat ini.

Pasar obligasi domestik yang mengalami pertumbuhan *yield* mendekati pasar obligasi kita adalah Turki, sebesar 26 persen. Dengan demikian, pasar obligasi Indonesia termasuk yang mengalami kenaikan *yield* tertinggi dibandingkan dengan negara-negara *emerging market* lainnya.

Hal itu terjadi karena pelaku pasar, terutama investor asing, menganggap Indonesia menghadapi risiko inflasi dan risiko anggaran yang lebih besar dari negara-negara lainnya.

Dengan kenaikan harga BBM hampir 30 persen pada akhir Mei 2008, kredibilitas anggaran Indonesia jauh lebih tinggi, tetapi kenyataannya harga obligasi kembali turun. Sekali lagi harga minyak ditengarai menjadi variabel utama yang mendorong kenaikan *yield* obligasi.

Kenaikan harga minyak menembus 130 dollar AS per barrel, memaksa investor membuat kalkulasi ulang untuk valuasi obligasi, terutama terkait risiko inflasi dan risiko anggaran yang berada pada level baru.

Padahal, jika harga minyak

stabil di level 120 dollar AS atau lebih rendah, kami memprediksi harga obligasi akan *rebound* dengan cepat pada Juni ini.

Untuk investor dan para pelaku pasar obligasi, kenaikan dan fluktuasi harga minyak di luar kendali mereka. Oleh karena itu semua mengharapkan pemerintah dan otoritas moneter dapat membuat kebijakan yang mampu meminimalisasi dampak harga minyak terhadap harga obligasi.

Ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan, antara lain melepaskan ekonomi dari belunggu *inflation overhang*. Ini dapat dilakukan dengan membuat rencana penyesuaian harga BBM secara bertahap dengan besaran yang tidak menimbulkan tekanan inflasi yang signifikan. Rencana ini memang tidak populer dan harus dilakukan dengan menghitung secara cermat dampaknya. Namun, ini lebih baik daripada dilakukan sekaligus dalam besaran kenaikan yang signifikan.

Kedua, meningkatkan fleksibilitas pembiayaan anggaran, dengan diversifikasi produk maupun diversifikasi sumber pembiayaan. Kenaikan target pembiayaan dari penerbitan surat utang pemerintah yang sangat signifikan tahun ini telah menaikkan posisi investor untuk meminta *yield* yang lebih tinggi pada obligasi pemerintah. Ini terutama di pasar perdana.

Bila pemerintah sebagai penerbit surat utang mampu membuat fleksibilitas pembiayaan anggaran, posisi penerbit dan investor obligasi dapat dibuat lebih setara. Kompetisi di sisi investor pasar obligasi penting diupayakan agar pasar obligasi kita *fair*.

Terakhir, kebijakan moneter pascakenaikan inflasi. Ini menyangkut kebijakan Bank Sentral untuk memberikan sinyal arah suku bunga terhadap pasar. Kebijakan suku bunga yang tidak reaktif akan membantu stabilitas pasar. Suku bunga yang tinggi akan menggerus nilai obligasi dan menaikkan *yield* obligasi.

BUDI SUSANT
Head of Debt Research
Danareksa Sekurita

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 21

TAHUN 2008

OPINI PEMBACA

Mencegah Ketimpangan

KONDISI teman-teman kita tengah menderita karena diterpa kondisi sosial dan finansial yang semakin mengekik. Harga kebutuhan pun melambung sangat cepat tanpa ada cara untuk menanggulangnya.

Hidup menderita di tengah kesulitan mencari kerja dan diterpa harga-harga melambung menambah depresi untuk kalangan bawah karena peningkatan pendapatan tidak ada. Muncul lagi masalah baru, kesulitan menerima konversi dari minyak ke gas belumlah usai.

Jika dilihat masalah utama yang dihadapi rakyat adalah kebingungan untuk menyikapi kesulitan yang menerpanya. Jika sudah mendapatkan pendapatan ekonomi yang memadai, biarpun BBM naik lebih tinggi mungkin rakyat tidak akan berisik seperti sekarang ini.

Dampaknya akan terlihat jelas ketika kita membaaur dengan kalangan bawah. Seperti pedagang, pekerja kelas bawah, pengemudi tak-

si, angkot atau kawan-kawan lainnya. Mungkin bisa dijadikan bahan pembuktian bahwa keputusan pemerintah menaikkan harga BBM menimbulkan banyak efek samping yang negatif buat kalangan bawah.

Apakah pemerintahan telah yakin dengan menaikkan harga BBM berarti menolong rakyatnya atau menaikkan harkat martabat bangsa? Jika memang begitu, keputusan pemerintah dalam hal ini teramat keliru.

Seharusnya pemerintahan menciptakan kemudahan lapangan pekerjaan atau membantu meningkatkan pendapatan keuangan rakyat (terutama di sektor riil) terlebih dahulu. Seperti mengingatkan kembali padat karya dengan membangun atau merenovasi kota-kota yang terlihat kusam. Itu akan menjadi kerja sama yang baik antara warga dan pemerintah. Jadi rakyat pun sudah memiliki

84

tameng untuk menghadapi kenaikan harga BBM.

Atau dengan membenahi lingkungan yang sudah rusak, semisal hutan-hutan yang telah hilang sebagian. Benahi bukit-bukit yang rawan longsor. Benahi sungai-sungai yang kadang meluap di kala hujan. Banyak cara untuk membantu rakyat selain bantuan langsung tunai (BLT).

BLT itu lebih banyak negatifnya, seperti mendidik rakyat jadi tahu bahwa tidak kerja juga masih bisa mendapatkan uang. Saling

untuk pengambilan BLT. Mungkin ketika sedang dikontrol pejabat, pembagian lancar.

Program BLT tidak sepenuhnya didukung para aparat desa, seperti yang terjadi di beberapa daerah Jawa Tengah. Banyak perangkat desa menolak karena berakibat buruk bagi rakyat.

Jika dilihat dari kondisi sekarang, kita tidak lagi punya kekuatan menolak atau menentukan sikap terhadap kondisi naiknya harga minyak dunia belakangan ini. Bukan karena tidak mampu menolak, melainkan karena tiada kemauan seperti itu.

Sebenarnya siapa yang berkapasitas menentukan harga minyak? Minyak kita yang punya. Tanpa impor kita juga bisa menggunakan minyak sendiri. Kenapa bukan bangsa Indonesia sendiri yang menentukan harga minyak kita? Jika mereka bilang mutu minyak kita rendah, kenapa harus diekspor ke mereka? Jika tidak jual minyak pun kita masih punya tambang lain yang bisa kita jual?

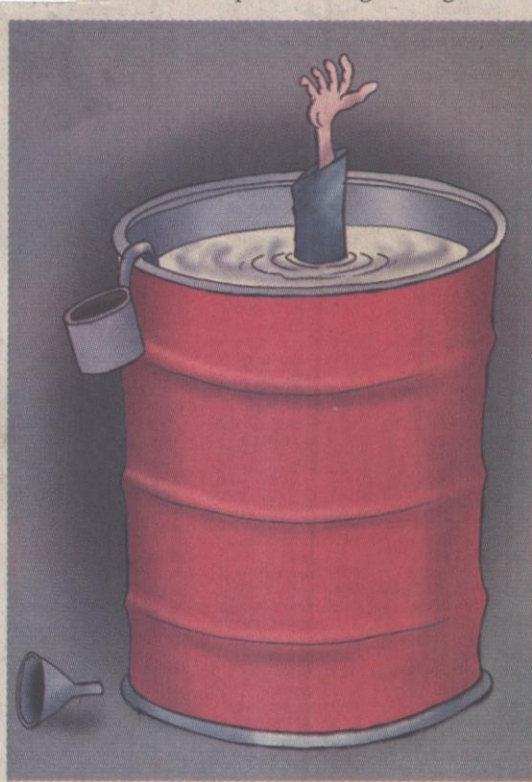
Pemerintah kita memang sangat kurang kedaulatannya. Bangsa Indonesia yang seharusnya menentukan siapa penentu kebijakan minyak. Di mana kedaulatannya sebagai bangsa yang nota benanya itu merdeka?

Malu mengakui kapasitas pemerintahan Indonesia di mata dunia masih lemah. Hingga mau disuruh menaikkan harga minyaknya pun oke? Padahal apa keuntungannya dengan mengikuti jejak mereka?

Solusi yang sebenarnya adalah menambang minyak kita sendiri dan mengelolanya sendiri. Tanpa campur tangan pihak asing. Nasionalisasikan semua aset energi tambang dan migas. Intinya nasionalisasi semua aset tambang dan migas juga BUMN. Itu solusi utama. Maka, ketimpangan tidak akan meluas seperti sekarang.

Jumadi Jaya

Masyarakat Miskin Kota
Monyet_bener@yahoo.co.id



■ TIYOK

iri satu sama lain jika pembagiannya tidak merata. Atau, menimbulkan konflik dan kecelakaan ketika sedang dalam antrian pengambilan dana BLT. Terjadi saling dorong atau saling injak. Bagaimana bisa program ini bisa terus dipelihara pemerintah?

Apakah pemerintah tidak mengerti pengambilan dana BLT juga sering menimbulkan berbagai masalah. Mungkin pemerintah baru berpikir untuk mengkaji ulang jika BLT menuai masalah besar atau konflik yang besar di kalangan rakyat. Seperti yang sudah sudah, akan ada tindakan jika sudah terjadi. Sayangnya pemerintah atau pengambil keputusan tidak pernah mau ada di bawah ketika sedang ada antrian

JCY

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

Sebuah Pelajaran dari Brasil, Membangun Kedaulatan Energi Nasional

Teddy Lesmana

Peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi
LIPI

Gejolak harga pangan dan minyak dunia suka atau tidak suka akan berpengaruh pada kehidupan perekonomian bangsa kita. Kenaikan harga BBM pada akhir bulan lalu kemungkinan bukanlah titik akhir dari rangkaian tren kenaikan harga minyak dunia yang masih terus akan berlanjut.

Pemerintah berencana pada 2009 akan menaikkan harga BBM secara bertahap. Konsekuensinya, beban ekonomi yang ditanggung oleh rakyat akan semakin berat karena pada saat yang sama sebagian warga bangsa ini masih hidup di bawah garis kemiskinan meskipun sejatinya antara kenaikan harga BBM dan kemiskinan merupakan permasalahan yang berbeda.

Kemiskinan yang masih menghantui bangsa ini tak lepas dari persoalan-persoalan struktural yang belum terselesaikan. Ini karena jika rakyatnya sejahtera, tentunya kenaikan harga BBM tak akan menimbulkan persoalan yang sedemikian kompleks.

Program Pro-Alcool

Dalam tulisan ini Brasil bisa dijadikan contoh. Ketika Indonesia mengalami *booming* minyak, Brasil justru mengalami krisis minyak. Brasil waktu itu termasuk negara yang tak memiliki sumber minyak yang besar dan bukan negara anggota OPEC.

Dalam menyikapi krisis akibat lonjakan harga minyak tersebut, pada 1975 Pemerintah Brasil menandatangani program yang diberi nama Pro-Alcool. Sejak saat itu Brasil

85

dengan serius mencoba mengemb-
bangkan energi alternatif ethanol
dari bahan baku tebu.

Meskipun tebu sebagai bahan ba-
ku ethanol juga merupakan bahan
baku gula, tidak terjadi benturan ke-
pentingan yang berarti antara kebu-
tuhan akan gula dan ethanol. Sejak
pencanangannya pada 1975 hingga
1985, produk ethanol dari tebu
berhasil tumbuh secara signifikan
dalam kerangka program Pro-Alcool
ini yang memberikan berbagai in-
sentif bagi pengembangan dan pe-
ningkatan produksi ethanol.

Setelah tahun 1985, akibat turun-
nya harga minyak, produksi ethanol

dari empat kekuatan ekonomi dunia
baru bersama dengan Rusia, India,
dan Cina (BRIC). PDB Brasil pada
2007 mencapai 1,240 triliun dolar
AS. Kesemuanya itu berawal dari
optimalisasi sektor pertanian untuk
kemudian membangun landasan
bagi pembangunan industri manu-
faktur. Suatu rangkaian proses yang
sebetulnya pernah dijalani oleh In-
donesia, tetapi tak berlanjut.

Pelajaran dari Brasil

Brasil kini tak hanya dikenal
sebagai negeri Samba dan produsen
pemain-pemain sepak bola kelas du-
nia, dengan persistensi keseriusan

negara yang notabene miskin mi-
nyak mengalami *oil crisis*. Indonesia
sendiri bergabung dengan OPEC
pada 1962 dan kini Indonesia justru
mulai memikirkan untuk keluar dari
OPEC karena sudah tergolong seba-
gai negara *net importer* minyak.

Akibat terlena dengan subsidi,
bangsa ini tak menghargai akan ke-
langkaan minyak sebagai sumber
energi yang tak terbarukan. Kita bi-
sa lihat betapa borosnya penggunaan
energi yang dibakar setiap harinya
oleh kendaraan-kendaraan bermotor
di jalan raya.

Belum lagi inefisiensi dalam uti-
lisasi energi di berbagai lini kehi-
dupan. Akibat dari pengabaian itu
pula, kita tak pernah siap untuk
membangun sistem dan jaringan
transportasi massal yang andal dan
memadai.

Dari gambaran suram yang kita
hadapi saat ini, memang seolah se-
muanya sudah serbaterlambat. Mes-
ki demikian, menilik dengan apa
yang telah dilakukan oleh Brasil
pada 1975, setiap kesulitan yang di-
hadapi dan disikapi dengan tindak-
an dan langkah yang positif mampu
mengatasi masalah untuk kemudi-
an menuai kesuksesan.

Akibat tak punya sumber minyak
yang memadai, Brasil berupaya ke-
ras memutar otak untuk dapat berta-
han. Akhirnya, tebu pun bisa jadi
bahan bakar.

Sebagai bangsa yang dikaruniai
kekayaan alam yang melimpah, ke-
manfaatannya kekayaan alam yang kita
miliki bukanlah tanpa *reserve*. Segala
sesuatunya harus ditempuh dengan
ikhtiar yang sungguh-sungguh.

Oleh karenanya, jadikanlah krisis
pangan dan energi yang mendera
kita ini sebagai sebuah lecutan untuk
bangkit menata kehidupan masa
depan yang lebih baik dengan komit-
men kebersamaan yang tinggi. Kita
bangun kedaulatan energi nasional
untuk kemaslahatan bangsa. ■

”
**Kita tidak cermat untuk mengantisipasi bahwa
minyak sebagai sumber daya alam (SDA) yang tak
terbarukan lambat laun akan habis.**
”

sempat mengalami penurunan. Mes-
ki demikian, sejak awal dekade
1990-an produksi ethanol dan gula
meningkat kembali akibat naiknya
daya beli masyarakat berpendapatan
rendah sebagai hasil dari program
pemerintah federal Brasil 'Plano
Real' yang mampu mengendalikan
laju inflasi.

Saat ini Brasil memiliki tak ku-
rang dari 336 pabrik ethanol dengan
kapasitas 16 miliar liter per tahun.
Sementara, biaya produksi ethanol
di Brasil 0,22 dolar AS per liter.

Sebagian besar pabrik ethanol terse-
but berlokasi di Sao Paulo. Selain bahan
baku dari tebu, saat ini Brasil juga mulai
mengembangkan ethanol yang berba-
han baku cassava (ubi kayu).

Kini Brasil merupakan salah satu

yang tinggi serta dengan kecerdasan
melihat potensi lahan pertanian yang
luas. Negara ini juga akhirnya saat
ini dikenal sebagai raksasa penghasil
bioethanol terbesar di dunia.

Sementara itu, sudah melekat erat
dalam alam sadar bangsa ini bahwa
harga BBM harus murah dan disub-
sidi. Oleh karenanya, ketika Indone-
sia masih menuai *windfall profit* dari
booming minyak yang terjadi pada
pertengahan dekade 70-an, kita ti-
dak cermat untuk mengantisipasi
bahwa minyak sebagai sumber daya
alam (SDA) yang tak terbarukan
lambat laun akan habis.

Pada saat negara-negara peng-
ekspor minyak termasuk Indonesia
waktu itu mendapatkan durian run-
tuh akibat *oil boom* tersebut, negara-

85

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 21

TAHUN 2008

Menyoal Pengguna Kompur Gas

SAYA ngeri membaca *Media Indonesia* edisi Senin, 9 Juni 2008. Pada berita utama, pembaca disuguhkan fakta yang terjadi terkait dengan keselamatan pengguna kompor gas. Ada delapan korban yang dihimpun *MI* sejak Juli 2007 sampai Juni 2008. Seperti yang terjadi di Kota Bekasi, pada 3 Juni 2008, tiga orang luka dan tiga rumah hancur. Belum lagi kejadian di beberapa daerah yang telah diberitakan media lokal. Karena itu, yang dapat saya simpulkan untuk sementara, kompor gas yang digunakan banyak orang menimbulkan trauma bagi keluarga korban dan mengancam keselamatan pengguna lainnya.

Semua tahu beralihnya masyarakat dari kompor minyak tanah (tradisional) ke kompor gas (modern) disebabkan program dari pemerintah. Program tersebut seperti halnya sesuatu yang wajib bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah memberikan paket gratis kepada masyarakat. Akan tetapi, perlu diingat tidak semua masyarakat paham dengan alat tersebut.

Ada dua fenomena sikap masyarakat terkait dengan program itu. Pertama, masyarakat yang belum siap dengan program itu. Biasanya kelompok tersebut trauma dengan kejadian-kejadian di sekitarnya. Mereka sudah telanjur takut dengan barang itu dan kebanyakan dari mereka kurang paham cara penggunaannya. Sebab itu, jangan heran apabila dari sebagian mereka, setelah mendapat paket gratis dari pemerintah, menjualnya kembali atau diberikan kepada orang lain yang mau.

Kedua, kelompok masyarakat yang mendukung pemerintah. Masyarakat yang sudah sedikit tahu tentang alat tersebut. Karena itu, ketika pemerintah memberikan alat tersebut, masyarakat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

Dengan adanya program konversi tersebut, sedikit demi sedikit kehidupan masyarakat menjadi modern. Pendukung program itu dulunya pakai kompor minyak tanah kini sudah berganti dengan kompor gas. Sebagian masyarakat mengatakan kompor gas lebih efisien, praktis, dan instan jika dibandingkan dengan kompor minyak tanah. Namun, melihat kejadian akhir-akhir ini, apakah kehidupan yang serbamodern, efisien, praktis, dan instan akan mengabaikan keselamatan kita?

Rifai

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)
Rifairifai94@yahoo.com

86

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2008

INDIKA ENERGY

**Indika Rampungkan
Akuisisi Tambang**

SAHAM PT Indika Energy Tbk (INDY) akan menuju level Rp 4.000. Sebab, kata sumber *Investor Daily*, perseroan akan merampungkan akuisisi perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur dalam waktu dekat ini.

Perseroan akan menggunakan dana hasil IPO untuk membiayai akuisisi dan pengembangan tambang tersebut senilai US\$ 100 juta. Pada penutupan perdagangan pekan lalu, INDY terkoreksi Rp 75 (2,2%) ke level Rp 3.400. Nilai transaksinya mencapai Rp 91,6 miliar. (jau)

87

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

Pan Orient Energy Akuisisi Blok Citarum

CALGARY- Pan Orient Energy Corp, perusahaan minyak dan gas (migas) asal Kanada, mengakuisisi sekitar 69% atau senilai US\$ 11 juta atau sekitar Rp 102,3 miliar Blok Citarum, Jonggol, Bogor, Jawa Barat dari Ranhill Energy Sdn Berhad Malaysia. Sebanyak US\$ 7 juta dibayar secara tunai dan US\$ 4 juta dalam bentuk saham.

Dalam laporan keterbukaannya kepada Bursa Efek Toronto di Calgary, Kanada, manajemen Pan Orient mengungkapkan, cadangan minyak dan gas (migas) yang terkandung di Blok Citarum merupakan yang terbesar di cekungan Jawa Barat. Cadangan gas terbesar ditemukan di Pasar Jadi, sekitar 256 juta kubik dan Subang sekitar 779 juta kubik.

Sebelumnya, Pan Orient menguasai blok Jatibarang yang diakuisisi dari Ranhill. Eksplorasi pertama akan berlangsung selama tiga periode dengan asumsi biaya sekitar US\$ 22,75 juta atau sekitar Rp 206 miliar.

Pan Orient telah mengincar Blok Citarum sejak tiga

tahun lalu yang ditawarkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, Pan Orient kalah dari Ranhill, setelah mengakuisisi saham 60% saham PT Bumi Parahyangan Ranhill Energia Citarum Pte Ltd yang memenangkan tender tersebut

Selain Blok Citarum, Pan Orient kini menguasai Blok Batu Gajah dan Blok Pamai Taluk, Sumatera Utara. Dari kontrak kerja sama (KKS) yang sudah disetujui badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Mei 2008, Pan Orient menguasai sekitar 500 hektare lahan konsesi di Batu Gajah, Sumatera Utara, dan 750 sampai 850 hektare di Citarum, Jawa Barat.

Sesuai hasil kajian, formasi geologis Blok Citarum adalah batuan bukan lumpur. Karena itu, manajemen Pan Orient menjamin eksplorasi tersebut tidak akan menimbulkan dampak luapan lumpur panas seperti yang terjadi di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. (c122)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18

TAHUN 2008

Kasus Lumpur Lapindo Tindaklanjuti Temuan Ilmiah Inggris

[JAKARTA] Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai penelitian ilmiah terkait penyebab luapan lumpur Lapindo di Sumur Banjar Panji-1, di Sidoarjo, Jawa Timur, dua tahun lalu sudah sangat jelas menyatakan penyebab terjadinya semburan adalah kesalahan pengeboran pihak operator di lapangan.

"Secara ilmiah sudah selesai. Yang berkembang sekarang justru persoalan politiknya," ujar Pengampanye Advokasi Tambang dan Energi Walhi, Pius Ginting, di Jakarta, Sabtu (12/6).

Menurut Pius hasil penelitian tim peneliti luar negeri yang dipimpin Richard Davies dari Universitas Durham, Inggris, yang diterbitkan *Journal Earth and Planetary Science* awal pekan ini (SP, 11/6) sudah semakin menegaskan penelitian yang selama ini dipublikasi di masyarakat.

Dalam jurnal tersebut, Davies dan timnya berpendapat berdasarkan kajian ilmiah yang dilakukan luapan lumpur Lapindo yang sudah dua tahun terjadi dan mengakibatkan puluhan ribu orang menjadi pengungsi, 99 persen dipastikan akibat kesalahan pengeboran dan sumur gas Banjar Panji-1.

Terkait dengan itu, Pius meminta kepada Pemerintah agar mengambil inisiatif dan menindaklanjuti kasus ini secara hukum atas kasus luapan lumpur. Sebab, ada kesan yang digunakan selalu atas argumentasi politik, bukan ilmiah.

Komnas HAM

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Ketua Tim Kasus Lumpur Lapindo Komnas HAM, Syafruddin Ngulma Simeulue, se usai bertemu dengan wakil PT Lapindo Brantas di Kantor Komnas HAM Jakarta, Jumat (13/6), mengatakan, Perpres 14 sudah tidak relevan lagi diberlakukan saat ini mengingat perkembangan luapan lumpur yang terjadi di lapangan sudah berdampak semakin luas ke permukiman penduduk.

"Presiden harus mengganti Perpres 14 dengan peraturan lain yang menjamin terpenuhi dan terpulihkannya semua hak korban Lumpur Lapindo," ujar Syafrudin.

Namun disebutkan, desakan Komnas HAM ini tidak ada kaitannya dengan temuan terkini hasil penelitian ilmiah luar negeri yang dipimpin Richard Davies mengenai penyebab terjadinya semburan lumpur.

"Dalam konstitusi disebutkan negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan menegakkan hak-hak setiap warga negara termasuk masyarakat Porong, Sidoarjo tanpa kecuali, termasuk warga yang saat ini disebut berada di luar peta terdampar," ujarnya.

Perumahan

Sementara itu, Vice President Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabussala di Jakarta, baru-baru ini menyatakan, masalah ganti rugi terhadap warga korban lumpur Lapindo, sedikit-demi sedikit terselesaikan.

Sebab, sebanyak 260 kepala keluarga (KK) telah menerima solusi yang ditawarkan Lapindo, yakni menempati perumahan di lokasi permukiman kembali (*resettlement*) di Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV), Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, Jawa Timur.

Menurut Andi, warga korban lumpur Lapindo, di antaranya Yohannes Imam Supandi menyambut baik permukiman kembali di KNV yang merupakan salah satu koordinator kelompok korban lumpur asal Perumahan Tanggulangan Anggun Sejahtera I (Perum TAS I).

"Waktu itu, hampir seluruh korban lumpur memiliki *cash and carry*, namun, dengan berbagai pertimbangan salah satunya adalah ingin mendapat rumah dengan pat, dia dan warga Perum TAS lainnya akhirnya memilih program pemukiman kembali," ujar Andi Darussalam Tabussala meniruk Yohanes. [E-7/M-15]

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

BAP Lemah, Lapindo Bisa Bebas

Surabaya – Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kasus luapan lumpur dari Sumur Banjar Panji-1 di kawasan eksplorasi PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, hingga kini masih terhambat perbedaan tafsir (pandangan) tentang saksi ahli, antara pihak jaksa penuntut dan polisi.

"Berkas masih ada di polisi, setelah kita kembalikan untuk keempat kalinya. Intinya, petunjuk kita masih seputar saksi ahli," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mulyono, kepada *Antara* di Surabaya, Sabtu (14/6).

Menurut Mulyono, kini ada dua pandangan dari para saksi ahli dalam kasus luapan lumpur tersebut, yang sejak pecah pada 29 Mei 2006 telah menggenangi areal seluas 600 hektare, yang menyebabkan ribuan penduduk kehilangan rumah dan sawah mereka dan 24 pabrik tutup.

"Ada saksi ahli yang menyebut penyebabnya bencana alam, tapi saksi ahli lainnya menyebut pengeboran yang dilakukan Lapindo-lah penyebabnya," katanya.

Mulyono mengingatkan bila dualisme itu dibiarkan, katanya, berkas lumpur La-

pindo akan menjadi lemah di tingkat pengadilan, sehingga PT Lapindo Brantas dapat bebas demi hukum.

"Kalau pengadilan menyatakan bebas, Lapindo akan bebas juga dari tanggung jawab, karena dia tidak merasa bersalah. Oleh karena itu, saksi ahli harus jelas-jelas menunjukkan adanya kesalahan Lapindo," katanya.

Sumber di kepolisian menyebutkan bahwa dualisme saksi ahli itu terkait petunjuk jaksa sendiri, sebab polisi sudah menyimpulkan penyebab luapan lumpur adalah pengeboran tanpa casing yang dilakukan PT

Lapindo Brantas.

"Itu ada buktinya, tapi jaksa meminta ada saksi ahli lain dari Lapindo, sehingga saksi ahli dari Lapindo tentu saja berpendapat lain dan akhirnya muncul dualisme. Karena itu, jaksa seharusnya bermusyawarah dengan polisi untuk memecahkan masalah itu, bukan justru membiarkan BAP terkatung-katung," kata sumber itu.

Serahkan ke Pengadilan

Pekan ini, sebuah tim peneliti independen yang terdiri dari para ahli geologi dari Universitas Durham, Inggris dan Universitas

California, Amerika Serikat, mengungkapkan temuan mereka bahwa luapan lumpur itu hampir dipastikan akibat kesalahan pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas Inc.

Mereka menyebut "99 persen" sebagai kesalahan teknis pengeboran. Gempa bumi memang bisa menyebabkan luapan lumpur, tapi menurut mereka kemungkinan itu sangat kecil, mengingat titik gempa yang cukup jauh dari sumur pengeboran Banjar-Panji 1 milik Lapindo.

Tim itu terdiri dari enam orang yang dipimpin oleh Profesor Richard J Davies, ahli geologi dan semburan lumpur dari Universitas Durham, Inggris, Maria Brumm (ahli gempa), Michael Manga (ahli gempa yang menimbulkan semburan lumpur), Rudi Rubianini (ahli teknik pengeboran dari Institut Teknologi Bandung), Richard Swarbrick (ahli geologi perminyakan), dan Mark Tingay (ahli geologi).

Laporan para peneliti itu merupakan laporan resmi pertama dari hasil penelitian independen yang dilakukan para ahli geologi internasional tentang lutan lumpur panas Lapindo. Hingga munculnya laporan tersebut, laporan-laporan yang ada selama ini tentang

lumpur Lapindo tak pernah secara khusus menyebutkan kesalahan pengeboran sebagai satu-satunya penyebab. Pihak Lapindo Brantas Inc telah membantah temuan tim independen tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam jumpa pers di Istana Wapres, Jumat (13/6), mengatakan hasil penelitian dari tim ini tidak menjadi acuan mutlak untuk menyatakan PT Lapindo Brantas Inc bersalah, keputusan mengenai hal ini ditentukan oleh pengadilan.

BAP kasus lumpur Lapindo ada tujuh BAP dengan 13 tersangka, yakni BAP Rahenold, Subie, dan Slamet BK (Drilling Supervisor PT Medici Citra Nusa); BAP Williem Hunila (Company Man Lapindo Brantas Inc); serta BAP Edi Sutriyono (Supervisor

Drilling), dan Nur Rahmat Sawolo (Vice President drilling PT Energi Mega Persada yang dikaryakan di Lapindo).

Selain itu, BAP Yenny Nawawi (Dirut PT Medici Citra Nusa), dan Slamet Rianto (Manajer Drilling PT Medici Citra Nusa), serta BAP Suleman bin Ali (Rig Manajer), Lilik Marsudi (juru bor), dan Sardianto (mandor). Ketiga nama terakhir berasal dari PT Tiga Musim Mas Jaya (TMMJ).

Dua BAP terakhir adalah BAP Imam P Agustino (GM Lapindo Brantas Inc) dan BAP Aswan P Siregar (mantan GM Lapindo Brantas Inc sebelum Imam). Para tersangka dijerat Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP dengan juncto UU 23/1997 tentang Lingkungan Hidup.

(ant)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 28

TAHUN 2008

Warung Subsidi, Solusi Kenaikan Harga BBM

WARUNG kejujuran sudah banyak berdiri di Kab. Bandung. Namun, kalau warung subsidi? Nah, jenis warung tersebut, baru diluncurkan Jumat (13/6) di Masjid Baitul Muttaqin, Jln. Purawakarta, Antapani, Bandung. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Duafa (DD) Bandung, memelopori pendirian warung subsidi itu.

Menurut Direktur DD Bandung Ima Rachmalia, warung subsidi diposisikan sebagai jawaban atas eksistensi kenaikan harga BBM yang memukul perekonomian rakyat kecil. "Harga paket sembako, kita subsidi sampai setengahnya. Misalnya, paket sembako Rp 40.000,00, kita jual Rp 20.000,00," katanya.

Selain itu, DD Bandung juga ingin mengembangkan potensi usaha berbasis masjid karena masjid dekat dengan masyarakat. "Masjid juga punya kepedulian untuk mendukung keberpihakan terhadap golongan ekonomi lemah yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Tahap awal, warung subsidi dibuka di Masjid Baitul Muttaqin," ucapnya.

Peluncuran warung subsidi diserbu 250 KK kurang mampu di sekitar Antapani yang sebelumnya didata pihak masjid dan DD Bandung. "Sebagian besar dari mereka adalah ibu-ibu rumah tangga sekitar Kelurahan Antapani Kidul. Untuk mendapatkan paket sembako, tidak bisa langsung datang ke warung melainkan didata dulu. Sebab, tidak semua orang boleh membeli," katanya.

DD Bandung menyebut kartu kendali warung sebagai ku-

pon khusus *member* (anggota) warung subsidi. "Warung tidak buka setiap hari, tetapi hanya buka sekali seminggu. Semoga paket sembako bisa bertahan selama seminggu," katanya.

PAKET subsidi yang terdiri atas 4 kg beras kualitas standar, 1 liter minyak goreng kemasan, dan 0,5 kg telur ayam yang dihargai Rp 20.000,00 dari harga normal Rp 40.000,00. "Warung akan buka selama tiga bulan ke depan yang nantinya mencakup 3.000 KK di wilayah Antapani dan sekitarnya sebagai proyek percontohan," katanya.

Warung subsidi itu disambut baik warga sehingga dalam waktu sejam barang dagangan habis dibeli warga. "Alhamdulillah, saya sangat terbantu dengan adanya warung subsidi ini. *Pangaos ayeuna awis pisan saatosna harga BBM* (harga-harga sekarang mahak sekali setelah kenaikan harga BBM-red.)," kata ibu empat anak, Ny. Jubaedah (45).

Pengakuan sama juga dikatakan Yayah (50) dan berharap agar warung subsidi terus buka untuk membantu warga. "*Hatur nuhun pisan* (terima kasih-red.) ke warung subsidi. Mudah-mudahan Allah membalas setimpal," ungkapnya.

Menurut staf pemberdayaan DD Bandung Handono Bhakti, dana pembelian sembako berasal dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dibayarkan kaum mampu. "Warung subsidi diharapkan makin menguatkan ikatan persaudaraan dan menumbuhkan empati antara masyarakat punya dan yang kurang mampu," katanya. (Sarnapi/PR)***

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 82

HIMAWAN WIJANARKO
General Manager Strategic Services

TAHUN 2008

KPI dan Subsidi BBM



DALIH kenaikan BBM bertujuan untuk mengalihkan subsidi BBM yang dinikmati orang kaya pemilik mobil kepada masyarakat miskin. Alasan kemiskinan juga digunakan oleh para penentang kenaikan harga BBM. Jika BBM dinaikkan, orang miskinlah yang terkena dampak paling serius dan jumlahnya akan bertambah. Kedua belah pihak melihat hal yang sama dalam perspektif berbeda, dengan kepentingan yang berbeda tetapi dengan alasan sama: kemiskinan.

Kemiskinan memang komoditi politik yang paling laku, apalagi menjelang Pemilu 2009. Fakta menunjukkan semua yang memerintah negeri ini pernah menaikkan harga BBM, termasuk yang sekarang menentang keras kenaikan BBM. Tampaknya motif untuk menyelamatkan anggaran lebih menonjol dalam setiap kenaikan BBM.

Salah satu korban kenaikan BBM adalah nelayan, golongan yang seharusnya berhak menerima subsidi. Kabarnya ada nelayan yang terpaksa tidak melaut. Soal mengurus subsidi BBM untuk nelayan ini, negeri tetangga sudah mempunyai pengalaman. Sejak Januari 2006, Pemerintah Malaysia memberikan subsidi bagi ribuan nelayan untuk membeli minyak solar melalui penerapan kartu kendali yang disebut *fleet card*. Dengan kartu ini, nelayan yang terdaftar dalam Fisheries Development Authority dapat membeli solar dengan harga subsidi.

Untuk memperoleh kartu ini, mereka harus melampirkan data-data yang dibutuhkan. Jika memenuhi syarat, permohonan akan dikabulkan dalam dua minggu. Kartu pintar ini berisi informasi seperti nama, gambar kapal serta perlengkapan yang dimiliki, nomor pendaftaran, dan kuota penggunaan bahan bakar bersubsidi. Yang menarik, dari sistem subsidi yang diberikan untuk nelayan ini, kuota pemberian subsidi dikaitkan dengan *key performance indicator* (KPI, ukuran kinerja terpilih). Jadi besarnya subsidi dikaitkan kinerja si nelayan, nelayan yang produktif berhak mendapatkan subsidi yang lebih besar dalam bentuk kuota yang lebih besar.

Bagaimana dengan organisasi bisnis? KPI sangat krusial bagi organisasi bisnis. Manakala sebuah organisasi telah menyusun strategi, diperlukan pengukuran yang menjadi indikator bagi ke-

majuan yang diraih, yang bersifat finansial maupun non-finansial.

KPI menjadi alat penting dalam menjembatani strategi dengan eksekusi, sebagai alat pemantau. Indikator yang dapat diidentifikasi dalam KPI dapat dikategorikan ke dalam indikator kuantitatif yang berbentuk angka, indikator praktis yang berhubungan dengan proses yang berlaku dalam organisasi, indikator yang bersifat pengarah yang menjelaskan secara spesifik apakah organisasi menjadi lebih baik atau tidak, serta indikator kemampuan organisasi dalam mengendalikan perubahan.

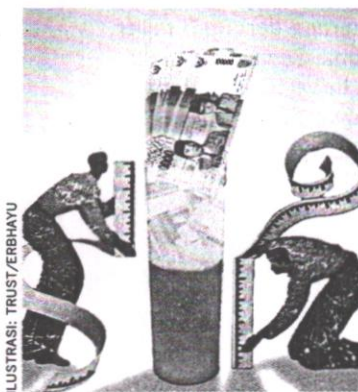
KPI harus merefleksikan faktor-faktor utama yang menjadi penunjang kesuksesan (*critical success factors*) bagi sebuah organisasi. KPI juga ber-

beda-beda bagi masing-masing organisasi. Sebagai contoh, KPI untuk sebuah perusahaan akan berbeda dengan sebuah institusi pendidikan atau sebuah instansi pemerintah. KPI yang ditetapkan harus mampu merefleksikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, menjadi kunci bagi kesuksesan organisasi, dan bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, serta terikat dengan kerangka waktu tertentu. KPI biasanya didasarkan atas pertimbangan jangka panjang. Adalah penting untuk

membatasi pemilihan indikator hanya pada hal-hal yang memiliki peranan paling penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

KPI digunakan sebagai alat bagi pengukuran kinerja, memberikan gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang dianggap penting. Dengan adanya KPI, setiap aktivitas yang dilakukan menjadi lebih terfokus. Dalam hal ini, KPI harus dipahami oleh seluruh anggota organisasi. Mereka juga harus memahami langkah-langkah korektif yang dapat dilakukan. Hal ini berhubungan dengan masalah akuntabilitas seluruh anggota organisasi. Yang tak kalah pentingnya adalah kebijakan insentif terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam KPI.

Penggunaan KPI memang harus dibudayakan dalam semua sisi kehidupan. Jadi kalau pemerintah menyatakan dana subsidi BBM dialihkan untuk mengatasi kemiskinan, harus disusun KPI-nya sebagai pengukur sejauh mana tingkat keberhasilannya. □



ILUSTRASI: TRUST/ERHAYU

”Kalau dana subsidi BBM dialihkan untuk mengatasi kemiskinan, harus disusun KPI-nya sebagai pengukur sejauh mana tingkat keberhasilannya.”

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

Industri TPT Mengaku Makin Tercekik

JAKARTA (Suara Karya): Kalangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mengaku makin tercekik akibat kenaikan harga BBM dan adanya gangguan listrik belakangan ini.

Masalah terkait lainnya adalah biaya ekonomi tinggi yang timbul akibat berbagai peraturan daerah (perda) serta ongkos angkutan yang naik semakin memperparah keadaan.

"Industri TPT bisa mati kalau terus begini. Bunga bank tingginya sampai 11-12 persen per tahun. Ditambah lagi harga listrik PLN per KWh-nya mahal serta sering pula padam," kata *General Manager* PT Pisma Putra Tekstil, Anies Soengkar, di Jakarta, Minggu (15/6).

Menurut dia, kondisi pabrik tekstil di Indonesia sangat parah, bahkan sekarang ada giliran dalam satu minggu sulit memperoleh pasokan energinya. Akibatnya, untuk pabrik *spinning* dengan 60.000 *spindle*, kerugiannya bisa sekitar Rp 300 juta per bulan.

Selain itu, lanjut dia, keadaan juga diperburuk oleh maraknya tekstil selundupan yang menggerus pasar TPT lokal. Konsumsi TPT di pasar domestik naik 20,43 persen menjadi 1,22 juta ton pada 2007, namun *share* penjualan produk dalam negeri di pasar domestik turun 42,98 persen menjadi 260 ribu ton.

Bahkan kenaikan harga BBM diperkirakan menekan konsumsi produk TPT

Indonesia yang sebesar 4,3 kg per kapita pada 2008 hingga 20 persen.

Oleh karena itu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang melindungi industri TPT dalam negeri dari banjirnya produk impor ilegal.

"Kami usul impor dibatasi melalui dua pelabuhan saja, untuk Indonesia barat melalui Jakarta (Tanjung Priok) dan untuk Indonesia timur melalui Surabaya (Tanjung Perak)," kata Ketua Umum API, Benny Soetrisno.

Pembatasan pintu masuk impor TPT itu diharapkan bisa menekan impor ilegal yang pada 2007 mencapai 862 ribu ton. Sepanjang Januari-Maret 2008, nilai impor TPT mencapai 721 ribu ton dengan nilai 1,2 miliar dolar AS, sedangkan ekspornya sebanyak 475 ribu ton dengan nilai 2,6 miliar dolar AS.

"Mudah-mudahan bisa menyusut hingga 50 persen dengan menekan impor ilegal. Harapan saya, semoga pelabuhan-pelabuhan yang resmi tidak ada lagi impor ilegal. Tapi memang tidak bisa dibersihkan seluruhnya karena masih ada pelabuhan minyak yang kecil-kecil," ujarnya.

Menurut dia, banjirnya

93

TPT impor menyebabkan industri TPT menengah dan kecil yang orientasi pasarnya 100 persen domestik kehilangan pasarnya dan berpotensi mematikan industri, menimbulkan PHK, risiko kredit macet, dan pendapatan pajak menurun.

Selain pembatasan pintu masuk TPT impor, API meminta pemerintah untuk menaikkan bea masuk (BM) TPT dari 15 persen menjadi 25 persen untuk produk

kain dan pakaian jadi.

"Itu dalam rangka pengamanan perdagangan, batasan tarif maksimalnya untuk kita itu 40 persen. Manakala pasar terancam oleh barang impor, harusnya bisa dinaikkan hingga 25 persen karena masih di bawah batasan itu," ujar Benny.

Saat ini ekspor TPT Indonesia dihantam tuduhan dumping oleh Turki yang juga telah mengenakan bea

masuk imbalan (*countervailing duties*) sebesar 1,2 dolar AS per kg untuk benang dan kapas.

"Seharusnya KADI (Komite Antidumping Indonesia) bisa melakukan itu. Ekspor tekstil itu dari Januari sampai Mei 2008 sudah dihantam oleh Turki 3 kali, satu dikenakan tuduhan dumping untuk benang serat buatan dan *countervailing duties* sepuluh kali untuk benang dan ka-

pas serta tuduhan dumping untuk *filamen yard*," ucapnya.

Dia berharap pemerintah membantu penyelesaian tuduhan dumping tersebut dengan melakukan lobi ke pemerintah Turki. "Tuduhan dumpingnya masih proses dan kita sudah jawab kuesioner dari Turki. Harapan kita, pemerintah kita bicara dengan pemerintah Turki. Itu baru akan dilakukan," katanya. (Antara/A Choir)

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8(

TAHUN 2008

■ SIMON SEMBIRING

Kalau Mau Kaya...

MENJADI pensiunan, memang, bukan perkara gampang. Harus siap mental. Sebab, ketika masa pengabdian berakhir, semua fasilitas yang dinikmati akan dilucuti. Tapi Simon Sembiring agaknya sudah siap menghadapi masa pensiun yang sebentar lagi datang.

Dirjen Minerba Departemen ESDM ini mengatakan, saat pensiun kelak, dirinya akan tetap berkuat dengan dunia pertambangan. Hanya posisinya yang berubah. Dia ingin lebih banyak menulis tentang dunia pertambangan. "Mungkin itu bisa berguna bagi bangsa ini," katanya kepada Dian Saraswati dari TRUST.

Simon lantas bercerita. Selama menjabat sebagai dirjen, banyak godaan datang menghampiri. Beruntung, dia masih mampu menahan bujuk rayu nan memabukkan itu. Walaupun harus menampik fulus besar, Simon mengaku bersyukur dengan apa yang kini dinikmatinya. "Kalau mau, saya bisa kaya dari dulu," tutur pria yang sudah lima tahun menjadi anak buah Purnomo Yusgiantoro di Departemen ESDM itu. □



94

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2008

Antisipasi Krisis Energi Kalau mau Selamat, Harus Hemat

Melambungnya harga minyak dunia telah menyebabkan krisis pangan dan energi secara global. Tidak urung masalah ini juga dialami Indonesia yang notabene Negara kaya dengan cadangan energi. Ironisnya, Indonesia kini menghadapi persoalan kekurangan energi, kini dengan alasan harga minyak internasional semakin tinggi, pemerintah Indonesia memilih menaikkan harga BBM dalam negeri dengan mengikuti harga pasar. Akibatnya rakyatpun dipaksa menerima kenaikan harga untuk setiap kebutuhan hidup dasar atas pangan dan energi.

Menurut catatan Walhi, Indonesia pada tahun 2007 telah memproduksi minyak sebesar 1.071 juta barel per hari. Namun perlu diingat, lebih dari 90 persen produksi tersebut dilakukan oleh perusahaan asing dan swasta. Setelah dikurangkan dengan *cost recovery*, maka Indonesia hanya mempunyai hak yang kecil atau sisanya saja.

Bukan hanya minyak, Indonesia juga produsen batubara yang cukup besar. Pada tahun 2006, RI memproduksi batubara sebanyak 195 juta ton, namun sebanyak 70 persennya untuk kebutuhan ekspor. "Karena begitu menariknya harga batu bara internasional bagi perusahaan pertambangan, akhirnya kontrak untuk pemenuhan kebutuhan batu bara bagi pembangkit listrik dalam negeri tidak bisa lagi terpenuhi," ungkap Pius Ginting, aktivis Walhi.

Akibatnya, pemadaman listrik harus sering dilakukan, termasuk di pulau-pulau yang justru penghasil sumber energi tersebut. Demikian pula gas, berdasarkan data tahun 2006, Indonesia memiliki cadangan gas sebesar 2,63 triliun meter kubik, dan memproduksi hingga 74 miliar meter kubik. Indonesia berada pada urutan kedelapan negara penghasil gas, namun mengalahkan negara penghasil sama lainnya dalam jumlah ekspor, dimana Indonesia berada pada urutan kedua, dengan jumlah ekspor sebanyak 40 persen.

Semua jenis energi tersebut merupakan energi fosil. Energi fosil artinya energi yang tidak bisa diperbaharui, maka cadangan energi Indonesia tersebut suatu saat akan habis. Mengingat produksinya begitu tinggi demi kepentingan ekspor. Kalau dibandingkan dengan cadangan produksi tahun 2006, maka minyak Indonesia akan habis dalam 11 tahun ke depan, batubara akan habis dalam 25 tahun, dan gas akan habis dalam 35,6 tahun kedepan. Kendati durasi ini bisa lebih lama karena masih terdapat cadangan potensial, namun hal tersebut menggambarkan bahwa suatu saat energi fosil akan habis, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan jika pemerintah lebih mementingkan ekspor.

Data catatan BPMigas, tahun 2009 kebutuhan harus ada penambahan minyak 620 barel per hari dari target total kebutuhan yang sebesar 1,3 juta barel, namun hasil eksploitasi tahun 2009 tidak begitu meng-

95

gembira diperkirakan hanya sekitar 420 barel per hari. Jika penurunan produksi bisa ditekan dan produksi migas meningkat maka perusahaan bisa mencapai target 1,3 juta barel. Saat ini Indonesia hanya memproduksi 0,32 persen minyak di dunia. Cadangan minyak nasional akan habis dalam kurun waktu 11 tahun.

"Tahun 2025 akan ada diversifikasi atau semacam pembagian berbagai macam energi, konsumsi minyak sebesar 20 persen dari konsumsi energi nasional, dengan total kebutuhan sebanyak 1,47 juta barel per hari agar cadangan minyak nasional aman dan dimanfaatkan secara optimal," tandas Triana Kartoatmodjo, Ketua Tim Percepatan Produksi Migas Nasional.

Dalam proses pembuatan minyak oleh alam, dari selembar daun, membutuhkan waktu hingga lima tahun. Namun manusia Indonesia menghamburkannya demi kepentingan ekspor yang tidak pernah dicicipi rakyatnya sendiri, sehingga dalam waktu singkat Indonesia mengalami krisis energi.

Indonesia jelas harus keluar dari energi fosil menuju energi baru. Namun strategi yang ditempuh haruslah adil. Tidak ada jalan untuk menyelamatkan energi fosil Indonesia kecuali dengan melakukan penghematan produksi secara sungguh-sungguh. Bahkan jika mungkin ditinggalkan saja, penghematan akan memberikan waktu yang cukup untuk pengembangan energi terbaru sebelum energi fosil benar-benar habis. Apalagi sangat jelas jika pemborosan energi fosil menyebabkan polusi dan penyumbang gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim.

Di Negara lain seperti Venezuela, Bolivia dan Ekuador telah melakukan usaha guna keluar dari krisis energi dengan memperkuat kedaulatannya. Ekuador contohnya telah mengajukan proposal ke komunitas dunia untuk tetap membiarkan minyaknya dalam perut bumi karena persoalan lingkungan dan sosial yang diakibatkan, sangatlah tidak setimpal jika terus saja memaksa minyaknya dieksploitasi.

Di Indonesia sebagian besar konsumsi BBM dalam negeri adalah untuk transportasi. Komposisi pada tahun 2006, adalah transportasi sebesar 46,7 persen, industri 24,6 persen, rumah tangga 18,2 persen dan listrik 10,5 persen. Sektor transportasi menyumbang emisi CO2 sebanyak 290 juta ton.

Dengan demikian perlu perbaikan dan pengembangan transportasi publik untuk mengurangi berbagai persoalan, seperti kemacetan, kecelakaan dan pemborosan energi. Penambahan jumlah kendaraan pribadi harus dibatasi dengan berbagai cara. Pengembangan dan perbaikan jalur kereta api atau transportasi misalnya adalah salah satu solusi di bagian hilir untuk bisa keluar dari krisis energi.

Tapi yang pasti, kalau Indonesia mau selamat dari krisis, maka semuanya harus hemat dalam penggunaan energi. ● resi

wewenangnya. Karena Bapepam tidak berhak terlibat dalam kegiatan operasional emiten, termasuk larangan jual beli sahamnya. "Itu urusan komisaris perusahaan. Kami hanya melihat jika ada masalah dalam laporan keuangan, transaksi atau mempertanyakan transaksi yang tidak dilaporkan," kata dia akhir pekan lalu.

Tuntut ke Pengadilan

Dia menegaskan, pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan wajib menyampaikan protes terkait transaksi saham tersebut. Bahkan, mereka juga dapat menuntut para pemegang saham Medco ke pengadilan.

Sementara itu, Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Bapepam-LK Noor Rachman mengatakan, transaksi penjualan saham Apexindo harus mengikuti peraturan No IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Aturan ini mewajibkan keterbukaan informasi transaksi saham Apexindo oleh Mitra Rajasa.

Sekretaris Perusahaan Mitra Rajasa Imaculata TM Wattimena menjelaskan, pihaknya siap diperiksa oleh regulator terkait akuisisi 80,57% saham Apexindo. Perseroan menilai telah mematuhi peraturan pasar modal dengan mengumumkan rencana akuisisi Apexindo kepada publik dan melaporkan ke Bapepam serta Bursa Efek Indonesia (BEI).

Mitra Jasa juga sudah menunjuk PT Zodiac Perintis, penilai independen yang terdaftar di Bapepam, terkait nilai akuisisi saham Apexindo. Nilai wajar saham Apexindo berkisar Rp 5,17-5,86 triliun atau seharga Rp 2.435-Rp 2.762 per lembar.

Dirut Encore International Yani Panigoro menegaskan, keputusan melepas Apexindo kepada Mitra Rajasa tidak semata-mata masalah harga. Namun, ada pertimbangan lain, seperti kemudahan dan kecepatan transaksi yang ditawarkan Mitra Rajasa.

Finalisasi akuisisi Apexindo masih menunggu persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB Medco Energi pada Juli 2008. (hut)